



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201  
Faksimile 024-7612334 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [dpusdataru@jatengprov.go.id](mailto:dpusdataru@jatengprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
Nomor : 027/ 4731/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR  
: 027/76/2019, TENTANG TIM TEKNIS PERSIAPAN PENGADAAN BARANG JASA  
DAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN KONTRAKTUAL DI LINGKUNGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang pengadaan barang / jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh organisasi / tim yang mendukung pengadaan yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang kredibel dan kompeten.
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu merubah keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tentang Tim Teknis Persiapan Pengadaan Barang Jasa dan Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Kontraktual
- d. Pekerjaan Kontraktual di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3833).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan